

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- , 2013, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Predanamedia, Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, cetakan ke-9, Rajawali Pers, Jakarta.
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta.
- Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- , 1986, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradinya Paramita, Jakarta.
- , 1968, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Anonim, 2007, *Buku Ajar Hukum Pidana 1*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Bambang Pernomo, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- C.S.T Kansil, Engelin R Palandang, Altje Agustin Musa, 2009, *Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nasional*, Jakarta.
- Didik Endro Purwoleksono, 2016, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Djisman Samosir, 1992, *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Binacipta, Bandung.

- I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Kusnadi, 2009, *Keberdayaan Nelayan dan Dinamika Ekosistem Pesisir*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta.
- K. Bertens, 2000, *Filsuf-filsuf Besar tentang Manusia*, Kanisius, Yogyakarta.
- Laden Marpaung, 2012, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Cetakan Ketujuh, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Mohammad Ekaputra, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Edisi 2, Usu Press, Medan.
- Moch. Faisal Salam, 2006, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Nafi' Mubarak, 2017, *Kriminologi dalam Perspektif Islam*, Dwiputra Pustaka Jaya, Sidoarjo.
- Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Pidana Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Satjipto Rahardjo, 2006, *Sisi Lain dari Ilmu Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta.
- Sianturi, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, BABINKUM TNI, Jakarta.
- Suharto, 2011, *Limbah Kimia dalam Pencemaran Udara dan Air*, Andi Offset, Yogyakarta
- Supriharyono, 2009, *Konvensi Ekosistem Sumberdaya Hayati*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Ketujuh, Liberty, Yogyakarta.

- Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Syahrudin Nawi, 2014, *Penelitian Hukum Normatif versus Penelitian Hukum Empiris*, Ed. 2., Cet.2, PT Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar.
- Syaiful Bakhri, 2009, *Hukum Pembuktian dalam Praktik Peradilan Pidana*, Total Media, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Yong Ohoitmur, 1997, *Teori Etika tentang Hukuman Legal*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Zainal Abidin Farid, 2014, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. JURNAL

- Andre G. Mawey, "Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum", *Jurnal Lex Crimen*, Fakultas Hukum Unsrat, Vol. 5, Nomor 2 Februari 2016.
- Effendy, "Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu", *Jurnal Kelautan*, Vol.2, Nomor 1 Januari 2009.
- Elisa Priskilia A Hasugian, "Tindak Pidana Penangkapan Ikan dengan Bahan Peledak di Wilayah Laut Indonesia" *Jurnal Lex Crimen VIII*, Vol. 1, Nomor 1 Januari 2018.
- Inggrieny Angelia Ester Pakpahan dkk, "Tindak Pidana Pembuatan Bahan Peledak *Low Explosive* Tanpa Izin" *Diponegoro Law Journal*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Jamila, "Tindak Pidana Kepemilikan Bahan Peledak", Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum , Vol. 23, Nomor 1 Juni 2020.

Kadek Intan Rahayu dan Mangku, "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Penangkapan Ikan Secara Ilegal Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Jurnal Komunitas Yustisia , Vol.2, Nomor 2 Maret 2019.

Mugiyati, "Hak Pemanfaatan Sumber Daya Alam", Jurnal Hukum Pidana Islam , Vol. 2, Nomor 2 Desember 2016.

C. SKRIPSI / DISERTASI

Annisa Dian Humaera, 2018, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penangkapan Ikan Menggunakan Bahan Peledak (Studi Kasus : Putusan Nomor. 55/Pid.Sus-LH/2016/PN.Snj)*, Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin, Makassar.

Ayu Widya Ningrum, 2019, *Upaya Kepolisian dalam Mencegah Penggunaan Bahan Peledak dalam Penangkapan Ikan di Perairan Sumatera Utara*, Skripsi, Fakultas Hukum Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.

Devi Agustin, 2019, *Analisis Hukum Positif tentang Jual Beli Petasan yang Mengandung Bahan Peledak*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung.

Syarif Saddam Rivanie Parawansa, 2020, *Deradikalisasi Sebagai Sanksi dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.

D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 154) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073).

Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 78).

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 1999 tentang Bahan Peledak.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pengamanan bahan peledak komersial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1602 Tahun 2017).